

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Penelitian ini membahas objektivitas berita mengenai konflik PKS dan Partai Demokrat dalam isu kenaikan harga BBM yang diterbitkan oleh Harian Republika. Maka dari itu, berita-berita mengenai konflik PKS dan Partai Demokrat dalam isu kenaikan harga BBM menjadi objek penelitian. Rentang waktu yang digunakan terhitung sejak Maret 2012-Juni 2013. Data-data pada bab ini merupakan data sekunder karena diperoleh melalui penelitian-penelitian terdahulu, situs internet, profil perusahaan Harian Republika, dan tinjauan kepustakaan.

#### **A. Deskripsi Media**

Peneliti memilih Harian Republika sebagai objek penelitian karena Harian Republika terkait dengan konflik antara PKS dan Partai Demokrat. Hal tersebut terkait langsung dengan PKS, sebuah partai politik dengan basis agama Islam. Sedangkan Harian Republika juga merupakan salah satu surat kabar harian besar di Indonesia dengan basis agama Islam.

Republika merupakan surat kabar beraliran Islam yang mampu mempertahankan eksistensinya selama tahun 1990-an diantara koran-koran Islam lainnya (Keller, 2009:82-83). Harian Republika pertama kali terbit pada tahun 1993, bekerjasama dengan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Harian Republika dikelola oleh Yayasan Abdi Bangsa yang pada saat itu dipimpin oleh BJ Habibie ketika masih menjabat sebagai Menteri Riset dan Teknologi (Fauzi,

2007:199). Pada tahun 1999, Republika menjadi koran pertama di Indonesia yang meluncurkan produknya di internet. Dua tahun kemudian Republika menjadi koran pertama yang melakukan pencetakan koran secara jarak jauh. Sampai pada akhirnya di tahun 2000, BJ Habibie memilih satu orang yang dipercaya menjadi pemimpin rangkap Republika, yaitu sebagai pemimpin redaksi dan direktur perusahaan (Keller, 2009:83).

Dalam Keller (2007:83) juga dijelaskan bahwa pada tahun yang sama, yaitu pada 2000, Republika merupakan koran pendukung agama Islam dan penganutnya. Republika juga disponsori oleh berbagai pebisnis Islam yang berpengaruh. Sampai pada saat ini, Republika masih bertahan meskipun laba yang diraih tidak besar. Masih di tahun yang sama, muncul Erick Thohir bersama grupnya, Mahaka, membeli saham mayoritas. Erick Thohir berperan sebagai pemilik Republika dan sebagai pemilik saham mayoritas.

Harian Republika mulai terbit pada 4 Januari 1993. Sampai saat ini, oplah penjualan Republika mencapai lebih dari 100.000 eksemplar setiap harinya. Hal ini semakin diperkuat berdasarkan hasil survey yang dilakukan oleh AC Nielsen Media Index pada tahun 1999/2000 lalu. AC Nielsen Media Index menempatkan Republika sebagai media kedua terbesar yang dibaca oleh masyarakat dengan usia produktif dan memiliki daya beli lebih (Fauzi, 2007:202).

Republika merancang serikat pekerja dan kesepakatan kerja sama yang merupakan hasil kesepakatan antara pihak manajemen dengan dewan perwakilan karyawan (Keller, 2007:90).

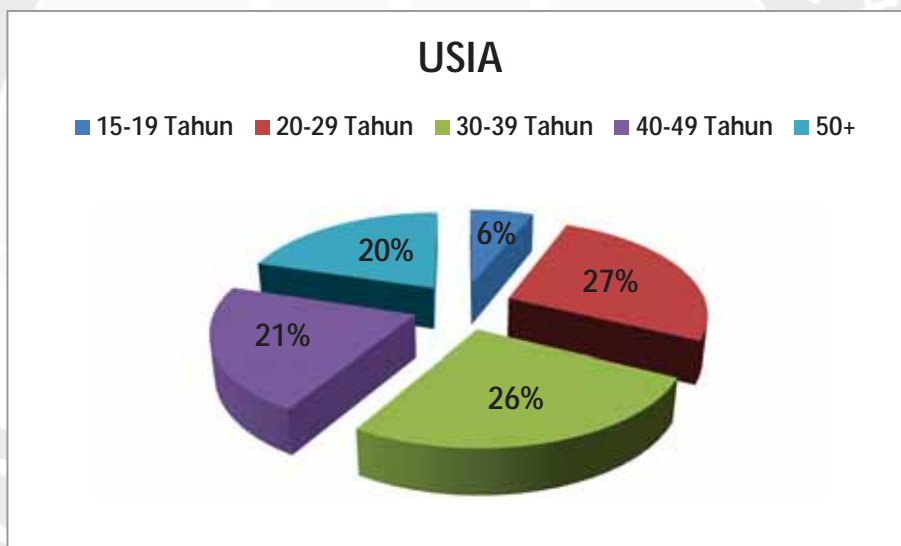
Saat ini, redaksional Republika dipimpin oleh Nasihin Masha dengan direktur utamanya adalah Daniel JP Wewengkang (Republika Online, 2012).

Rubrik di pada Harian Republika dilengkapi dengan uraian-uraian yang mencerminkan agama Islam seperti Kolom Hikmah, Dialog Jurnal, Dompot Dhuafa, dan Lembaran Haji. Namun, rubrik-rubrik tersebut hanya ada pada massa-massa tertentu. terdapat pula rubrik Islam Digest yang terbit pada hari Minggu dengan bahasan-bahasan mengenai Islam baik dari lokal Indonesia maupun mancanegara.

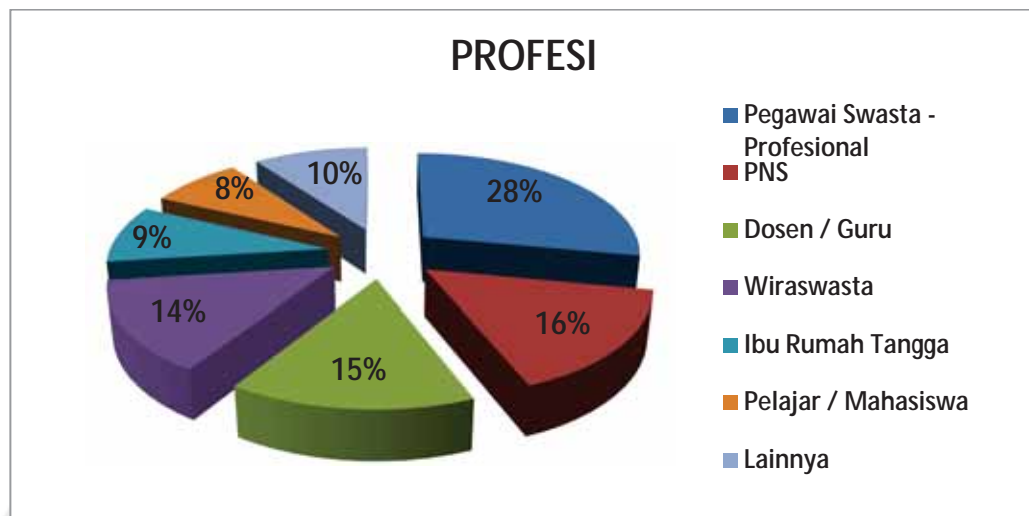
Menurut survey Nielsen Consumer Media View pada November 2012 dan Internal Survey Republika 2011, menunjukkan bahwa merupakan surat kabar yang dibaca oleh masyarakat dengan usia produktif dengan persentase mencapai 26% dan dibaca oleh masyarakat dengan profesi rata-rata sebagai pegawai swasta dan kalangan profesional dengan persentase mencapai 28%. Berikut ini merupakan hasil survey AC Nielsen Consumer Media View 2012 dan Internal Survey Republika tahun 2011:



Sumber: *republika.co.id* (2012)



Sumber: *republika.co.id* (2012)



Sumber: [republika.co.id](http://republika.co.id) (2012)

## **B. Profil Partai Keadilan Sejahtera (PKS)**

### **1. Visi dan Misi PKS**

#### **Visi PKS:**

PKS mencita-citakan terwujudnya masyarakat Indonesia sebagai masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang adil, sejahtera, dan bermartabat. Cita-cita tersebut didasarkan pada aspek nilai-nilai, norma, hukum, moral yang ditopang oleh keimanan, menghormati pluralitas, bersikap terbuka dan demokratis, serta bergotong-royong untuk menjaga kedaulatan negara. Aspek tersebut menjadi latar belakang dalam memperluas budaya hidup yang aman dan damai serta mengokohkan sikap solidaritas sosial. Dengan berdasar pada Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, PKS yang juga merupakan bagian dari masyarakat akan terus berjuang melalui jalur politik dengan bersikap rasional, objektif, konstitusional.

Adil, sejahtera, dan bermartabat merupakan kunci PKS dalam mencapai visinya. Berdasarkan pada ideologi yang dianut, PKS menghindarkan berbagai macam bentuk perbuatan tidak sesuai nilai dan norma, penindasan, sikap berlebihan, merugikan pihak lain, diskriminasi, kebencian, dan sikap sewenang-wenang. Prioritas lain yang menjadi visi PKS adalah menghindari dominasi yang dilakukan kepada pihak lain. *(pks.or.id,2013)*

#### **Misi PKS:**

PKS memelopori reformasi sistem politik, pemerintahan dan birokrasi, peradilan, dan militer untuk berkomitmen terhadap penguatan demokrasi. Hal ini sejalan dalam mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenang setiap lembaga agar terjadi proses saling mengawasi. *(pks.or.id,2013)*

PKS menyebut, akan mendorong penyelenggaraan sistem ketatanegaraan yang sesuai dengan fungsi dan wewenangnya sebagai suatu keniscayaan yang harus dijalani demi perubahan hubungan ketatanegaraan yang lebih baik. (Platform Kebijakan Pembangunan Partai Keadilan Sejahtera, 2008:219)

## 2. Logo PKS



**GAMBAR 1**  
**Logo Partai Keadilan Sejahtera**

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Keadilan Sejahtera Bab I, Pasal 4 tentang Lambang, PKS dicirikan dengan gambar dua bulan sabit yang mengapit padi menguntai tegak lurus. Simbol berwarna kuning emas, yang berada di dalam persegi panjang warna hitam berbentuk ka'bah. Di bagian paling bawah terdapat tulisan sejahtera dengan warna kuning emas.

### **C. Profil Partai Demokrat**

#### **1. Visi dan Misi Partai Demokrat**

##### **Visi Partai Demokrat:**

Keberadaan Partai Demokrat mewujudkan cita-cita masyarakat Indonesia dalam mencapai kehidupan seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Hal tersebut melingkupi kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur. Semangat nasionalisme, humanisme, dan internasionalisme juga ditekankan

di dalam visi Partai Demokrat. Pada pelaksanaannya, visi ini dijalankan secara damai, demokratis, dan sejahtera. (*demokrat.or.id*, 2014)

### **Misi Partai Demokrat:**

Pelaksanaan visi dan misi Partai Demokrat dilakukan dengan berproses dalam pembangunan negara Indonesia. Pembangunan tersebut dilakukan disemua bidang kehidupan kemasyarakatan. Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan perdamaian, demokrasi, dan kesejahteraan masyarakat. (*demokrat.or.id*, 2014)

### **2. Logo Partai Demokrat**



**GAMBAR 2**  
**Logo Partai Demokrat**

Berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Demokrat Bab II, Pasal 7 tentang lambang, Partai Demokrat adalah partai politik berlambang bintang bersinar tiga arah dengan warna merah putih pada kedua sisinya. Bintang bersinar tiga memiliki makna tiga hal yang tidak dapat dipisahkan yaitu nasionalis-religius, pluralisme, dan humanisme.



Sedangkan warna merah dan putih pada masing-masing sisi bintang menunjukkan nasionalisme bangsa Indonesia. Latar belakang dengan warna biru laut berarti penuh dengan kedamaian dalam hidup bermasyarakat, sedangkan warna biru tua melambangkan optimisme, kepercayaan diri, kemandirian, dan keteguhan dalam memperjuangkan cita-cita bangsa Indonesia.

#### **D. Gambaran Konflik PKS dan Partai Demokrat tentang Kenaikan Harga BBM**

Kabinet Indonesia bersatu II merupakan badan pemerintahan yang berada dalam kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) periode masa jabatan 2009-2014. Pada pemilihan umum legislatif tahun 2009, Partai Demokrat kembali meraih suara terbanyak dan secara otomatis menjadi partai politik yang maju dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun yang sama. SBY kembali dipilih oleh Partai Demokrat sebagai calon presiden setelah sebelumnya juga menjabat sebagai presiden pada periode masa jabatan tahun 2004-2009. Hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2009, KPU memutuskan bahwa SBY kembali memenangkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, bersama pasangannya yaitu Boediono. Partai Demokrat kemudian membentuk sebuah koalisi yang terdiri dari Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), dan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura).

SBY beserta partai koalisinya kemudian melanjutkan beberapa kebijakan yang pada tahun-tahun sebelumnya telah dibuat. Salah satu diantaranya adalah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Rencana pemerintah menaikkan harga BBM dikarenakan adanya lonjakan konsumsi. Hal ini diketahui setelah pemerintah menghitung volume penggunaan BBM bersubsidi selama Januari hingga Februari 2012. Harga BBM yang murah menyebabkan konsumsi BBM melonjak. Akibatnya, negara melalui pemerintah harus menanggung beban subsidi sangat besar.

Hal ini menuai berbagai respon dan protes dari masyarakat. Tidak hanya dari masyarakat saja, tetapi juga dari beberapa partai koalisi Kabinet Indonesia Bersatu II. Partai-partai tersebut adalah PKS, Golkar, Gerindra, dan Hanura. Sedangkan partai politik di luar koalisi (oposisi) yang ikut menolak rencana pemerintah menaikkan harga BBM adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Muncul perdebatan antara anggota dewan yang pro dan kontra. Dengan berbagai pertimbangan, pada akhirnya partai-partai koalisi yang pada awalnya menolak, sejalan dengan pemerintah dan menyetujui adanya kenaikan harga terhadap BBM bersubsidi. Namun reaksi keras ditunjukkan oleh PKS yang tetap bertahan pada keputusannya yang memilih tidak sejalan dengan keputusan presiden. Sampai pada akhir sidang paripurna, PKS tetap bertahan pada keputusannya menolak kenaikan harga BBM. Pada dasarnya, partai-partai politik yang tergabung dalam koalisi sejalan dengan keputusan yang diambil oleh presiden. Hal ini kemudian menyulut konflik antara PKS dengan Partai Demokrat.

Konflik kedua partai ini semakin panas ketika PKS memasang spanduk-spanduk yang berisi penolakan kenaikan harga BBM di sejumlah kawasan di Jakarta. Sedangkan Partai Demokrat yang dibantu oleh masyarakat pendukung kenaikan harga BBM juga turut serta memasang spanduk yang berisi mendukung kenaikan harga BBM. Tidak sekedar memasang spanduk, PKS dan Partai Demokrat saling serang melalui adu pendapat. Adu pendapat ini tersebar melalui media-media yang berusaha melakukan konfirmasi terhadap isu kenaikan harga BBM. Bukan jalan keluar yang diutarakan oleh para kader, justru saling serang pendapat semakin membuat konflik diantara kedua partai politik tersebut semakin panas.

#### **E. Berita Seputar Konflik PKS dan Demokrat Mengenai Isu Kenaikan Harga BBM**

Dalam penelitian ini berita-berita seputar konflik PKS dan Partai Demokrat mengenai isu kenaikan harga BBM menjadi objek penelitian. Seluruh berita tersebut berada dalam rentang waktu bulan Maret 2012-Juni 2013. Berikut ini 37 artikel berita dari berbagai rubrik pada Harian Republika yang dianalisis menggunakan analisis isi:

**TABEL 3**  
**Berita Konflik PKS dan Partai Demokrat Mengenai Isu BBM pada**  
**Harian Republika**

No	Judul Berita	Tanggal
1	Setgab Pecah Soal BBM	6 Maret 2012
2	Masih Ragu	16 Maret 2012
3	Skenario Voting Bahas BBM Disiapkan	16 Maret 2012
4	PKS Surati SBY	24 Maret 2012
5	Surat PKS Dilebihkan	26 Maret 2012
6	Soal BBM, Parpol Harus Jaga Etika	31 Maret 2012
7	Soal PKS, SBY Kembalikan ke Koalisi	2 April 2012
8	Nasib PKS di Tangan SBY	3 April 2012
9	SBY Enggan Bicarakan PKS	4 April 2012
10	Sanksi <i>Reshuffle</i> Ancam PKS	5 April 2012
11	Tiga Opsi Untuk PKS	8 April 2012
12	Menteri PKS Berkurang Satu	9 April 2012
13	PKS Pilih Pasif Soal <i>Reshuffle</i>	10 April 2012
14	SBY Takut PKS Besar	11 April 2012
15	PKS Mulai Gerah di Setgab	18 April 2012
16	PKS Nilai SBY Takut Golkar	21 April 2012
17	PKS: Pemerintah tak Seriusi Energi	4 Juni 2013
18	Ketidakpastian Jadi Beban	5 Juni 2013
19	Wapres Berharap Koalisi Kompak	5 Juni 2013
20	PKS-PD Makin Panas	7 Juni 2013
21	SBY Diminta Akhiri Konflik PKS-PD	8 Juni 2013
22	Perang Spanduk PKS Vs Demokrat	10 Juni 2013
23	Koalisi Tekan PKS Soal BBM	10 Juni 2013
24	PKS Segera Tentukan Sikap	10 Juni 2013
25	PKS Bulat Tolak Kenaikan BBM	11 Juni 2013
26	PKS tak Anggap Demokrat Mitra	12 Juni 2013
27	Setgab Keluarkan PKS	13 Juni 2013
28	Setgab Tunggu Sikap PKS	13 Juni 2013
29	Istana Bantah Depak PKS	14 Juni 2013
30	Sikap PKS Sudah Tepat	14 Juni 2013
31	PDIP Sebar Spanduk Tolak Harga BBM Naik	15 Juni 2013
32	Menteri PKS Terkunci	18 Juni 2013
33	Internal PKS Saling Tuding	19 Juni 2013
34	Setgab Serahkan Menteri PKS ke SBY	19 Juni 2013
35	PKS Didepak, Menteri Aman	21 Juni 2013
36	PKS Klaim Diamankan SBY	24 Juni 2013
37	Menteri PKS Bertahan	25 Juni 2013

Sumber: *Harian Republika*